

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country known as an agricultural country because most of the population's livelihoods are farmers who work in the agricultural sector, so the agricultural sector is important for the Indonesian economy as a foundation in economic development and food security. This research analyzes the role of the Plant Variety Protection Act in protecting the rights of farmers in plant cultivation and the criminal provisions in the Plant Variety Protection Act. This legal research aims to determine the criminal aspects of the rights of farmers as plant cultivators in Law No. 29/2000 on Plant Variety Protection. Juridical studies related to legal protection in Law No. 29/2000 on Plant Variety Protection against farmers.

This research uses normative legal writing with a statutory approach, concept approach, and case approach. The legal materials used are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Plant Variety Protection Act No. 29 of 2000, the Sustainable Agricultural Cultivation System Act No. 22 of 2019, the Food Act No. 18 of 2012, the Plant Cultivation System Act No. 12 of 1992 as primary legal materials, secondary legal materials in the form of textbooks, digital books, online journals on plant variety protection, plant cultivation and farmer welfare, and the KBBI.

In the implementation of the Plant Variety Protection Act, especially the criminal aspects and legal protection issues for farmers can have a significant impact on their welfare. Legal protection of farmers covers various aspects that regulate their rights and responsibilities. The need to regulate the protection of farmers' rights in the Plant Variety Protection Act ensures that the policy not only supports innovation in plant breeding but also protects the welfare of farmers.

Keywords: *Criminal Aspects, Legal Protection, Farmer Protection*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar mata pencaharian penduduknya sebagai petani yang bekerja di sektor pertanian, sehingga sektor pertanian menjadi penting bagi perekonomian Indonesia karena sebagai landasan dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Dalam penelitian ini menganalisis tentang peran Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dalam melindungi hak-hak petani dalam pembudidayaan tanaman dan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui aspek pidana terhadap hak-hak petani sebagai pembudidaya tanaman dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Kajian yuridis terkait perlindungan hukum dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman terhadap petani.

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum ini menggunakan penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dengan bahan hukum yang digunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Nomor 29 Tahun 2000, Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Nomor 22 Tahun 2019, Undang-Undang Tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, Undang – Undang Tentang Sistem Budidaya Tanaman Nomor 12 Tahun 1992 sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa buku teks, buku digital, jurnal online tentang perlindungan varietas tanaman, pembudidayaan tanaman dan kesejahteraan petani, serta KBBI.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman terutama aspek pidana dan masalah perlindungan hukum terhadap petani dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Perlindungan hukum terhadap petani mencakup berbagai aspek yang mengatur hak-hak dan tanggung jawab mereka. Perlunya pengaturan perlindungan hak-hak petani dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya mendukung inovasi dalam pemuliaan tanaman tetapi juga melindungi kesejahteraan para petani.

Kata Kunci : *Aspek pidana, Perlindungan Hukum, Perlindungan Petani*